

**ANALISIS FAKTOR - FAKTOR
YANG MEMPENGARUHI PERGULIRAN DANA
DI DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
PROPINSI JAWA TENGAH**



TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Pascasarjana
pada Program Magister Manajemen Pascasarjana
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

AMPERANTO KUSNARDI
NIM. C4A098005

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2002**

PENGESAHAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis berjudul :

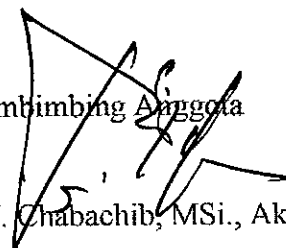
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERGULIRAN DANA DI DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI JAWA TENGAH

yang disusun oleh Amperanto Kusnardi, NIM C4A098005 telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 25 September 2002 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing Utama


Drs. Sugeng Wahyudi, MM.

Pembimbing Anggota

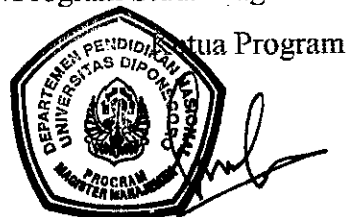

Dr. HM. Chabachib, MSi., Akt.

Semarang, September 2002

Universitas Diponegoro

Program Pasca Sarjana

Program Studi Magister Manajemen



Prof. Dr. H. Suyudi Mangunwihardjo



SERTIFIKASI

Saya, Amperanto Kusnardi, yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis yang saya ajukan ini adalah hasil karya saya sendiri yang belum pernah disampaikan untuk mendapatkan gelar pada program Magister Management ini ataupun pada program lainnya. Karya ini adalah milik saya, karena itu pertanggungjawabannya berada di pundak saya.

AMPERANTO KUSNARDI, SP

September 2002

ABSTRACT

This research that has been conducted in central Java Province is pointed to analyze the influence of socialisation, activity identification, institution and revolving management and also the influence of those factors together towards the success of revolving fund program.

The problem in this reasearch is “ are those factors influence revolving fund program ? “ . This reasearch uses multiple linier regression programming. Using this analyze will lead us to know the influence of those factors as together or partial. We also analyze the crossing posibility toward classic assumption of linier regression.

The results of this reasearch (with 5 % significance level) shows that socialization institution and revolving management influence significantly to revolving fund, but not the activity identification . Whereas using the multiple regression analysis shows that the success of revolving fund is influenced by socialization, activity identification, institution and revolving management as together.

ABSTRAKSI

Penelitian ini dilakukan di wilayah Propinsi Jawa Tengah bertujuan untuk menganalisis pengaruh sosialisasi, identifikasi kegiatan, kelembagaan dan pengelolaan perguliran serta pengaruh tersebut secara bersama-sama terhadap keberhasilan program perguliran dana.

Permasalahan penelitian ini adalah apakah faktor faktor tersebut berpengaruh terhadap perguliran dana. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan regresi linier berganda. Dengan metode ini akan dapat diketahui pengaruh keempat faktor tersebut baik secara serentak terhadap program perguliran dana serta pengaruhnya secara individual. Selain itu dalam penelitian ini juga di analisis tentang adanya penyimpangan dari model regresi tersebut terhadap asumsi klasik regresi linier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor sosialisasi, kelembagaan dan pengelolaan perguliran berpengaruh nyata terhadap program perguliran dana, akan tetapi faktor identifikasi kegiatan tidak berpengaruh nyata. Sedangkan hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa keberhasilan perguliran dana dipengaruhi faktor sosialisasi, identifikasi kegiatan, kelembagaan dan pengelolaan perguliran secara bersama-sama.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Yang atas limpahan rahmat serta karuniaNya, penulis telah berhasil menyelesaikan penulisan tesis ini yang diberi judul “ Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Perguliran Dana Di Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah “ . Tesis ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan derajat sarjana S-2 pada program studi MM UNDIP Semarang.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan tesis ini tidak terlepas dari bantuan serta dorongan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, dengan tulus hati penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang mendalam kepada :

1. Drs. Sugeng Wahyudi, MM. Selaku dosen pembimbing I yang di sela – sela kesibukannya telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk, koreksinya dan masukannya yang sangat bermanfaat sehingga terselesaikannya tesis ini.
2. Dr. HM. Chabachib, MSi., Akt. Selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan dorongan, bimbingan, arahan serta masukan yang sangat berarti sehingga penulisan tesis ini dapat selesai.
3. Bp / Ibu Soekanto adalah ayah serta ibu tercinta yang senantiasa memberi doa dan restu kepada penulis agar selalu berhasil mencapai tujuan.
4. Devita Argumanti Ibnida, istri saya yang senantiasa setia dan selalu mendorong membantu terselesaikannya tesis ini.
5. Bp. Ir. Galih Rasiono, MPi dan Bp. Yoseph Niron, BSc. Selaku Ka. Subdin Perencanaan dan Pengembangan dan Kasie Monitoring dan Evaluasi Dinas Perikanan dan Kelautan, yang telah memberikan bantuan dan dorongan sehingga penulisan tesis ini dapat berjalan dengan lancar.
6. Rekan-rekan Subdin Perencanaan dan Pengembangan yang telah memberikan dukungan semangat yang terus menerus untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini.


7. Rekan-rekan mahasiswa dan alumni program MM UNDIP, khususnya angkatan IX yang telah membantu memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari, mengingat berbagai keterbatasan yang penulis miliki, maka tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian penulis telah berupaya semaksimal mungkin agar tesis ini tersusun dengan sebaik-baiknya seta mempunyai bobot dan bermanfaat. Untuk itu, kritik serta saran bagi perbaikan hasil penelitian ini sangat penulis harapkan.

Akhir kata, penulis sangat berharap bahwa walau sekecil apapun mudah-mudahan hasil penelitian ini apat memberi manfaat, dan semoga kiranya Allah SWT. Senantiasa memberikan kekuatan serta kemampuan lahir dan batin kepada kita untuk selalu mampu berbuat yang terbaik.

Semarang, Oktober 2002

Penulis



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| Halaman Judul | i |
| Surat Pernyataan Keaslian Tesis | ii |
| Halaman Persetujuan..... | iii |
| Abstract | iv |
| Abstraksi | v |
| Kata Pengantar | vi |
| Daftar Isi | viii |
| Daftar Tabel | ix |
| Daftar Gambar | x |
| Daftar Lampiran | xi |
| Datar Rumus | xii |
| Bab I Pendahuluan | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Perumusan Masalah | 7 |
| 1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 8 |
| 1.4. Outline Tesis | 9 |
| Bab II Telaah Pustaka dan Pengembangan Model Penelitian | 10 |
| 2.1. Sosialisasi | 11 |
| 2.2. Identifikasi Jenis Kegiatan | 13 |

| | |
|---|-----------|
| 2.3. Kelembagaan | 15 |
| 2.4. Pengelolaan Perguliran | 18 |
| 2.5. Penelitian Terdahulu | 19 |
| 2.6. Kerangka Penelitian Teoritis dan Hipotesis..... | 20 |
| Bab III Metode Penelitian | 23 |
| 3.1. Jenis dan Sumber Data | 23 |
| 3.2. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel | 24 |
| 3.3. Definisi Operasional Variabel | 25 |
| 3.4. Metode Analisis | 27 |
| Bab IV Analisis Data | 33 |
| 4.1. Gambaran Umum Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah | 33 |
| 4.2. Proses dan Hasil Analisis Data | 42 |
| Bab V Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan | 53 |
| 5.1. Kesimpulan Hipotesis | 53 |
| 5.2. Kesimpulan Masalah Penelitian | 54 |
| 5.3. Implikasi Pada Kebijakan Manajemen | 54 |
| 5.4. Keterbatasan Penelitian | 57 |
| 5.5. Agenda Penelitian Mendatang | 58 |
| Daftar Pustaka | 59 |
| Lampiran-lampiran | 63 |

Daftar Tabel

| | |
|--|----|
| Tabel 1.1 Perkembangan Pinjaman TA. 1997-2002 | 6 |
| Tabel 3.1 Tabel Definisi Operasional Variabel | 27 |
| Tabel 4.1 Tabel Koefisien Korelasi Pearson | 42 |
| Tabel 4.2 Tabel Koefisien Kolinieritas Statistik | 43 |
| Tabel 4.3 Tabel Hasil Uji Durbin Watson | 43 |
| Tabel 4.5 Tabel Hasil Uji “t” | 47 |
| Tabel 4.6 Tabel Hasil Uji “F” | 48 |
| Tabel 4.7 Tabel R Square | 49 |

Daftar Gambar

| | |
|--|----|
| Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran Teoritis | 21 |
| Gambar 4.1 Bagan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah | 41 |
| Gambar 4.2 Diagram Pencar Variabel Regresi | 44 |
| Gambar 4.3 Grafik Histogram | 45 |
| Gambar 4.4 Grafik Normalitas | 46 |

Daftar Lampiran

| | |
|---|----|
| Lampiran 1 Data Hasil Penelitian | 61 |
| Lampiran 2 Daftar Informasi Variabel Penelitian | 63 |
| Lampiran 3 Format Permintaan Data ke Kabupaten / Kota | 65 |
| Lampiran 4 Hasil Analisis Data | 68 |

Daftar Rumus

| | |
|---|----|
| Rumus 1 Penentuan Jumlah Sampel | 24 |
| Rumus 2 Persamaan Fungsi Regresi | 28 |
| Rumus 3 Persamaan Model Regresi | 28 |
| Rumus 4 Rumus Uji “F” | 29 |
| Rumus 5 Rumus Uji “t” | 29 |
| Rumus 6 Rumus Regresi Linier Hasil Penelitian | 46 |

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Luas wilayah laut Indonesia yang mencakup 75 % wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dengan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat kaya dan beragam, diyakini dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional dan tumpuan masa depan apabila berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi, dapat dipecahkan secara komprehensif dan terpadu serta berkelanjutan.

Potensi pembangunan yang berbasis sumberdaya kelautan dan perikanan, yang merupakan domain ekonomi Departemen Kelautan dan Perikanan adalah pendayagunaan sumberdaya perikanan tangkap dan perikanan budidaya, baik laut maupun perairan umum, industri pengolahan hasil perikanan, bioteknologi laut dan perairan air tawar, benda benda berharga serta pengelolaan pulau-pulau kecil.

Permasalahan yang dihadapi sektor kelautan dan perikanan terdiri dari permasalahan yang bersifat internal maupun eksternal. Masalah internal yang sangat menonjol antara lain adalah yang menyangkut kelemahan yang ada pada nelayan dan pembudidayaan ikan beserta unit usahanya, ketimpangan tingkat pemanfaatan sumberdaya, terbatasnya sarana dan prasarana perikanan dan fasilitas pendukungnya, kerusakan lingkungan laut, dan masih banyak praktek ilegal, unregulated dan unreported fishing karena lemahnya law enforcement. Masalah eksternal yang sangat berpengaruh adalah lemahnya dukungan kebijakan moneter, fiskal, dan kredit perbankan yang kurang kondusif.

Menurut Wiratno, dkk (1999) menunjukkan bahwa permasalahan yang dijumpai secara umum untuk aspek pemasaran meliputi jangkauan pasar yang luas, pangsa pasar dan pengetahuan petani tentang pemasaran yang relatif rendah. Dari aspek kewirausahaan permasalahan yang ada dijumpai dalam keberanian dalam menanggung resiko bisnis masih rendah dan alokasi waktu usaha yang relatif rendah. Dalam aspek kelangsungan produksi meliputi ketidakstabilan harga sarana produksi dan ketersediaannya yang kadang-kadang mengalami kelangkaan. Permasalahan yang dijumpai dalam aspek potensi pertumbuhan relatif rendah, karena kurang adanya jalinan usaha kerja sama usaha sejenis, belum adanya bapak angkat dan hasilnya belum banyak digunakan perusahaan lain. Dilihat dari aspek tenaga kerja secara umum kesulitannya pada kualitas SDM, modal dan belum adanya usaha-usaha pelatihan yang memadai. Dari aspek kebijaksanaan pemerintah kesulitannya kebanyakan dijumpai pada aspek pembinaan (usaha, budidaya, pemasaran, perbankan dan upah), peran kredit program yang belum baik, juga peranan koperasi yang belum memuaskan, terlebih lagi LSM belum pernah terkait dalam usaha pembinaan para petani komoditi tanaman pangan.

Dari data Susenas 1999 yang dikeluarkan BPS, tidak kurang 47,97 juta penduduk Indonesia harus hidup dibawah garis kemiskinan atau sebesar 23,43 % dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan dari seluruh penduduk pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia, sekitar delapan puluh persennya adalah penduduk yang masih terlilit dalam kemiskinan, sementara itu kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kawasan yang secara hayati sangat produktif. Keadaan paradoks ini terutama disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan, terbatasnya akses terhadap modal, teknologi, informasi dan pasar serta keterbatasan

keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan alokasi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kemiskinan penduduk pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut mendorong peningkatan kerusakan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Kerusakan ini disebabkan oleh eksploitasi yang tidak ramah lingkungan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan masyarakat dalam mencari sumber-sumber pendapatan. Selain itu kemiskinan juga mendorong kecemburuan sosial diantara kelompok masyarakat yang sering kali mengganggu keamanan berusaha di pesisir dan pulau-pulau kecil (Wiratno, dkk, 1999)

Dalam keadaan yang demikian ini realisasi kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam UU No.25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas), telah memutuskan untuk mengurangi subsidi BBM secara bertahap. Masalahnya, selama ini subsidi BBM yang dimaksudkan untuk membantu masyarakat miskin, justru lebih banyak dinikmati golongan masyarakat menengah ke atas, dan juga menciptakan peluang bagi penyelundupan karena harga BBM di pasar dunia lebih mahal. Di sisi lain keputusan ini akan berimplikasi pada kenaikan harga BBM rata-rata 12 % yang artinya pula akan berpengaruh pada kenaikan harga barang serta menurunkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, khususnya dari kelompok masyarakat miskin.

Untuk mengatasi akibat buruk pengurangan subsidi tersebut, sebagaimana yang telah disepakati DPR dan Pemerintah, terdapat alokasi dana sebesar Rp. 2,2 triliun dari penyesuaian APBN TA. 2001 untuk kompensasi sosial bagi masyarakat rentan/miskin, kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak pengurangan subsidi untuk melindungi masyarakat miskin melalui program-program yang langsung dapat diterima manfaatnya, khususnya yang menyangkut

ketersediaan pangan, layanan pendidikan, kesehatan, pengadaan sarana air bersih, pemberian kredit mikro kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, transportasi, serta pemberdayaan masyarakat pesisir.(Riyadi, M., 2001) .

Dengan mendasarkan pada strategi management dan Pengembangan Perikanan yang diputuskan dalam konferensi tingkat dunia dari FAO tentang management dan pengembangan perikanan (WC FMD) pada tahun 1984, paragraf 12 bab IV (tentang peranan dan kebutuhan petani ikan) menyatakan : “ Perhatian harus diberikan untuk menciptakan fasilitas kredit bagi nelayan berskala kecil sesuai situasi dan kondisi perekonomian mereka yang lemah serta kebutuhannya yang khusus “. (Fauzi, dkk, 1992) Maka pemerintah mulai mengucurkan dana subsidi BBM tersebut dalam bentuk bantuan langsung kepada masyarakat. Namun sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.3 tahun 2002 maka bantuan langsung kepada masyarakat harus diberikan dalam bentuk dana bergulir. Dalam pelaksanaannya pengucuran dana ini dipadu dengan program pemberdayaan masyarakat. Apabila kegiatan pemberdayaan masyarakat lapisan bawah belum berhasil meningkatkan pendapatan dan membuka lapangan kerja baru seperti yang diharapkan, maka yang paling penting dikaji adalah menemukan apa dan di mana akar permasalahannya. (Tampubolon, M, 2002)

Isu pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan masyarakat desa pada era globalisasi dan transparansi semakin banyak dibicarakan dalam forum-forum diskusi yang dilakukan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, nasional dan internasional, dan melalui artikel-artikel dalam media masa. Kesimpulannya mempersoalkan : sikap apatis masyarakat terhadap proyek pembangunan, partisipasi masyarakat yang rendah dalam pembangunan, penolakan masyarakat terhadap beberapa proyek pembangunan, ketidak berdayaan masyarakat untuk

memenuhi kebutuhan serta pemecahan masalahnya, tingkat adopsi masyarakat yang rendah terhadap inovasi, dan masyarakat cenderung menggantungkan hidup terhadap bantuan pemerintah, serta kritik-kritik lainnya yang umumnya meragukan bahwa masyarakat memiliki potensi untuk dilibatkan sebagai pelaksana pembangunan. Meskipun kritik-kritik di atas ada benarnya, tetapi dengan hanya menyalahkan masyarakat tanpa mencari faktor-faktor penyebabnya maka permasalahannya tidak dapat dipecahkan. Yang lebih penting adalah mencari solusi yang sifatnya komprehensif. Faktor utama penyebab permasalahan itu adalah rendahnya sumberdaya manusia (SDM). Karena itu upaya-upaya pemberdayaan masyarakat melalui aktualisasi pendidikan perlu mendapat perhatian. Pendidikan memegang peranan kunci dalam mencetak SDM yang berkualitas.

Pendidikan yang diperlukan oleh masyarakat pedesaan untuk membangun diri dan lingkungan tentunya adalah pendidikan yang bersifat partisipatif aktif. Suatu pendidikan yang dituntut untuk dapat menghasilkan kemampuan masyarakat dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri serta mampu mengangkat permasalahan dan sekaligus menyelesaikan sebagaimana yang dikatakan oleh Tampubolon (2002) bahwa yang dibutuhkan masyarakat lapisan bawah terutama yang tinggal di desa adalah pola pemberdayaan yang sifatnya bottom up intervention yang menghargai dan mengakui bahwa lapisan bawah mempunyai potensi untuk memenuhi kebutuhannya, memecahkan permasalahannya, serta mampu melakukan usaha-usaha produktif dengan prinsip swadaya dan kebersamaan.

Merumuskan suatu pola pemberdayaan masyarakat lapisan bawah yang tergolong miskin adalah pekerjaan rumit. Karena karakteristik mereka yang berbeda, dan setiap perbedaan menuntut pola pemberdayaan yang berbeda pula.

Semua kekuatan, kelemahan dan permasalahan yang ada perlu diidentifikasi dengan cermat, terutama yang berhubungan dengan pola pikir mereka yang sangat lokalit, terbelakang, statis tradisional, sulit berubah, sulit mengadopsi inovasi, serta tidak berdaya untuk hidup mandiri.(Tampubolon 2002).

Dari pengalaman yang telah lalu pelaksanaan program dana bergulir masih menemui banyak hambatan. Bahkan dengan banyaknya masyarakat yang menganggap bahwa dana ini hanya merupakan hibah maka perguliran dana tersebut sangat sulit diharapkan. Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah pun tak terkecuali, khususnya dalam rangka mengentaskan kemiskinan bagi masyarakat nelayan dan pantai, program dana bergulir banyak dikururkan melalui proyek - proyek Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah sejak tahun 1990 hingga sekarang. Namun perkembangan dana ini, dengan berbagai sebab sangat sulit diharapkan. Meskipun ada keberhasilan namun prosentase keberhasilan ini masih jauh dari yang diharapkan.

Tabel : 1.1

Perkembangan Pinjaman (kredit) TA. 1997 - 2002

| No | Kabupaten / Kota | Jumlah Pinjaman | Pengembalian | Sisa Pinjaman s/d Th. 2002 | Prosentase Pengembalian |
|----|------------------|-----------------|---------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | Kab. Pekalongan | 1.896.667.000 | 2.102.737.575 | --- | 110,86 |
| 2 | Kab. Sukoharjo | 204.000.000 | 21.300.000 | 182.700.000 | 10,44 |
| 3 | Kota Magelang | 2.000.000 | --- | 2.000.000 | --- |
| 4 | Kab. Klaten | 35.000.000 | 500.000 | 34.500.000 | 1,43 |
| 5 | Kab. Magelang | 237.000.000 | 34.750.000 | 202.250.000 | 14,66 |
| 6 | Kab. Semarang | 90.980.000 | 12.200.000 | 78.780.000 | 13,41 |

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Prop. Jateng

Dari tabel di atas nampak bahwa hanya Kab. Pekalongan yang dianggap berhasil dalam program perguliran dana ini namun daerah lainnya masih jauh dari keberhasilan sehingga penulis memandang perlu untuk mengetahui faktor – faktor yang mendukung keberhasilan program perguliran dana ini, sehingga diharapkan mampu mengangkat kehidupan dan kesejahteraan petani dan nelayan.

1.2. Perumusan Masalah

Dalam rangka mengentaskan kemiskinan masyarakat desa nelayan, pemerintah melalui Dinas Perikanan dan Kelautan memberikan program bantuan langsung kepada masyarakat yang sifatnya bergulir. Dana bergulir ini dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat miskin desa nelayan. Dengan berhasilnya pemberdayaan masyarakat maka diharapkan kemiskinan di desa nelayan secara perlahan akan dapat terangkat. Namun demikian tidak semua program perguliran ini dapat berjalan sebagaimana diharapkan. Untuk itu mengingat betapa penting dan mendesaknya program ini maka, akan sangat penting dan mendesak pula untuk mengetahui :

1. Apakah variabel sosialisasi mempengaruhi program perguliran dana ?
2. Apakah variabel identifikasi kegiatan mempengaruhi perguliran dana ?
3. Apakah variabel kelembagaan mempengaruhi perguliran dana ?
4. Apakah variabel pengelolaan perguliran mempengaruhi perguliran dana ?
5. Apakah keempat variabel tersebut di atas secara bersama-sama mempengaruhi perguliran dana ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian :

Tujuan penelitian adalah :

1. Menganalisis pengaruh sosialisasi terhadap perguliran dana .
2. Menganalisis pengaruh identifikasi jenis kegiatan terhadap perguliran dana.
3. Menganalisis pengaruh kelembagaan terhadap perguliran dana.
4. Menganalisis pengaruh pengelolaan perguliran terhadap perguliran dana.
5. Menganalisis pengaruh keempat faktor di atas secara bersama – sama terhadap perguliran dana.

1.3.2. Kegunaan Penelitian :

Kegunaan hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi Dinas Perikanan dan Kelautan, informasi hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan keberhasilan program perguliran dana di masa – masa yang akan datang.
2. Bagi petugas pelaksana di lapangan informasi mengenai faktor – faktor yang berpengaruh ini dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai hal – hal yang mungkin harus diberi perhatian lebih dalam pelaksanaan di lapangan.
3. Bagi lembaga keuangan di desa informasi ini dapat berguna sebagai perhatian mengenai hal-hal yang menyebabkan tidak kembalinya dana bergulir.
4. Bagi petani / nelayan keberhasilan dalam program ini akan memutuskan hubungan dengan rentenir, sehingga harga tidak lagi dapat ditekan oleh mereka.

1.4. Outline Tesis

- Bab I : Membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan outline dari tesis.
- Bab II : Membahas tentang telaah pustaka dan pengembangan model penelitian yang terdiri dari pendahuluan, telaah pustaka, kerangka pemikiran, hipotesa dan definisi operasional variabel.
- Bab III : Membahas tentang metode penelitian tentang pendahuluan, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, teknik analisis.
- Bab IV : Membahas tentang analisis data yang terdiri dari pendahuluan, gambaran umum obyek penelitian dan data diskriptif, proses dan hasil analisis/ komputasi data, pengujian hipotesa dan kesimpulan.
- Bab V : Membahas tentang kesimpulan dan implikasi kebijakan yang terdiri dari pendahuluan, kesimpulan hasil regresi, kesimpulan hasil uji ekonometri dan kesimpulan mengenai masing-masing hipotesa, implikasi pada teori manajemen, implikasi pada kebijakan manajemen, keterbatasan penelitian dan agenda penelitian mendatang.

BAB II.

TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN MODEL PENELITIAN

Pola pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan adalah bukan kegiatan yang sifatnya top down intervention yang tidak menjunjung tinggi aspirasi dan potensi masyarakat untuk melakukan kegiatan swadaya. Akan tetapi yang paling dibutuhkan masyarakat lapisan bawah terutama yang tinggal di desa adalah pola pemberdayaan yang sifatnya bottom up intervention yang menghargai dan mengakui bahwa masyarakat lapisan bawah memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhannya, memecahkan permasalahannya, serta mampu melakukan usaha-usaha produktif dengan prinsip swadaya dan kebersamaan. Apabila kegiatan pemberdayaan masyarakat lapisan bawah belum berhasil meningkatkan pendapatan dan membuka lapangan kerja baru seperti yang diharapkan, maka yang paling penting dikaji adalah menemukan apa dan dimana akar permasalahannya. Pengetahuan tentang akar permasalahan ini membantu untuk merumuskan suatu strategi pemecahan masalah yang lebih tepat dan efektif. Merumuskan suatu pola pemberdayaan masyarakat lapisan bawah yang tergolong miskin adalah pekerjaan rumit. Rumit, karena karakteristik yang mereka miliki berbeda. Dan setiap perbedaan menuntut pola pemberdayaan yang berbeda. Semua kekuatan, kelemahan dan permasalahan yang ada perlu diidentifikasi dengan cermat, terutama yang berhubungan dengan pola pikir mereka yang sangat lokalit, terbelakang, statis tradisional, sulit berubah, lambat mengadopsi inovasi, serta tidak berdaya untuk hidup mandiri. Proses pemberdayaan masyarakat hendaknya disusun dalam bingkai pendekatan yang harmonis dengan memperhatikan sistem nilai dan kelembagaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat setempat, potensi lokal dan unit

usaha masyarakat. Pemberdayaan diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pengambilan keputusan dan pengawasan pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir. Upaya tersebut akan menjamin kesinambungan peningkatan pendapatan masyarakat dan pelestarian sumberdaya pesisir dan laut. (Pedoman Umum PEMP, 2002). Di bawah ini akan dibahas mengenai faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap program perguliran dana.

2.1. Sosialisasi

Sosialisasi program pemberdayaan kepada masyarakat ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat serta pemerintah lokal dalam proses pelaksanaan program pemberdayaan. Sedangkan menurut Kogut dan Zanders dalam Sidik (1999) mengatakan bahwa disseminasi dalam hal pengetahuan mempunyai beberapa alasan yaitu bahwa ; pertama, kegiatan ini merupakan kegiatan yang relatif sulit dilakukan bila tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, kedua, dapat mempermudah mempelajari segala sesuatu yang harus dilakukan melalui diskusi, dan melalui instruksi tertulis yang telah dipersiapkan. Sosialisasi ini dilakukan melalui forum sosialisasi di pusat maupun di daerah. Pihak yang terlibat dalam forum tersebut meliputi aparat, pemerintah, tenaga bantuan teknis, tokoh masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan pihak yang berkepentingan. (Pedoman Umum PEMP, 2001).

Tujuan disseminasi tingkat propinsi dan kabupaten adalah :

1. Memberikan penjelasan kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
2. Memberikan penjelasan program dana bergulir secara lengkap dan jelas.

3. Menyamakan persepsi tentang pelaksanaan program antara semua pelaksana tingkat propinsi, kabupaten / kota, Kecamatan dan desa / kelurahan.

Sedangkan sosialisasi tingkat desa dilakukan oleh pemimpin proyek bersama dengan konsultan manajemen teknis tingkat kabupaten / kota dengan peserta kepala desa / kelurahan, aparat desa / kelurahan, pengurus LKMD, ketua RW / RT, tokoh masyarakat dan masyarakat desa / kelurahan.

Tujuan sosialisasi adalah :

1. Memberikan penjelasan tentang tujuan, sasaran dan filosofi program.
2. Memberikan penjelasan tentang tahapan kegiatan pelaksanaan program.
3. Menyusun rencana tindak lanjut tingkat desa. (Pedoman Umum P3EMDN, 2002)

Fungsi sosialisasi terhadap program perguliran dana beberapa diantaranya adalah : Pertama, menghindari persepsi yang keliru tentang program dana bergulir, mengingat bahwa program ini merupakan suatu bentuk pinjaman lunak yang sangat berbeda sifatnya dengan bentuk kredit pada umumnya maka pengenalan atau penjelasan di tingkat organisasi maupun masyarakat menjadi sangat penting. Tidak jarang karena kesalahan persepsi, masyarakat menganggap bantuan ini hanya merupakan hibah dari pemerintah atau mereka beranggapan karena dana ini berasal dari pemerintah maka dana tersebut dianggap hanya pemberian yang bersifat cuma-cuma, jadi tidak perlu dikembalikan. (Rahayu, 2001). Sudah barang tentu hal ini akan merusak program dengan sistem dana bergulir ini. Karena dalam program perguliran dana, apabila salah satu anggota peminjam dana gagal / tidak membayar maka akan terhenti pulalah perguliran dana tersebut. Ke dua adalah transparansi. Dengan semakin tersosialisasikannya program tersebut maka pelaksanaan program akan menjadi lebih transparan.

Dalam sistem anggaran belanja pemerintah, sistem pertanggungjawaban hanya dilakukan pada tahun yang bersangkutan, sedangkan dalam perguliran dana justru kelangsungan / kelanjutan merupakan hal yang lebih penting dan menjadi tolok ukur bagi keberhasilan program tersebut. Maka di sini terjadi perbedaan kepentingan, antara pertanggung jawaban keuangan dengan keberhasilan program.

Penyebarluasan informasi tentang program kepada masyarakat dapat dilakukan melalui pertemuan umum pada tingkat dusun, lingkungan atau dalam pertemuan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Penyebarluasan informasi juga dapat dilakukan melalui papan – papan informasi yang telah tersedia di tempat-tempat umum, seperti kantor desa, Puskesmas, tempat ibadah, sekolah dan tempat-tempat lainnya yang ramai dikunjungi masyarakat (Pedoman Umum P3EMDN, 2002).

Dari penjelasan di atas maka diduga bahwa sosialisasi berpengaruh terhadap perguliran dana.

2.2. Identifikasi Jenis Kegiatan

Pada dasarnya sumberdaya laut dapat merupakan potensi yang menghasilkan devisa yang cukup besar. Pemberdayaan sumberdaya laut itu dapat dilakukan dengan cara melakukan pendekatan dengan para nelayan, misalnya melakukan pemberdayaan kepada kelompok nelayan miskin, lalu diusahakan untuk bisa mengorganisasikan diri. Setelah para nelayan terorganisir dengan baik, dicarikan profesional manajemen sehingga dapat membantu nelayan tersebut membuat suatu proyek untuk mengembangkan potensi sumberdaya laut. (Diamar, S, 2001).

Berdasarkan pengalaman yang pernah dialami, persoalan-persoalan yang ditemui dilapangan disebabkan oleh :

1. Sosialisasi dan pengumpulan usulan kegiatan sangat singkat, hanya dua sampai empat hari dengan waktu pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kurang dari lima puluh hari. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat tidak mengetahui kegiatan ini.
2. Organisasi pelaksanaan program terlalu besar tanpa tugas dan tanggung jawab yang jelas.
3. Usulan program hanya didasarkan pada hasil pertemuan elit desa tanpa pelibatan masyarakat sehingga 12 dari 64 desa kelurahan melakukan penolakan terhadap usulan dan usulan harus direvisi kembali.
4. Tidak ada pendampingan pada masyarakat sehingga pemberdayaan hanya diterjemahkan sebagai mengikut sertakan masyarakat sebagai tenaga kerja.
5. Lemah dalam pemantauan dan pengawasan. (Rahayu, dkk, 2001)

Permasalahan-permasalahan yang banyak terjadi pada program pemberdayaan masyarakat, terutama adalah disebabkan karena faktor rendahnya sumberdaya manusia. Hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat laut. Dampak yang ditimbulkan terungkap pada akses masyarakat terhadap sumberdaya laut dan penguasaan teknologi kelautan yang masih rendah (Pujiyati, 2001). Karena itu upaya-upaya pemberdayaan masyarakat melalui aktualisasi pendidikan perlu mendapat perhatian. (Tampubolon, M. 2002). Kendala yang masih dirasakan masyarakat adalah keengganan menegur sesama anggota masyarakat apabila dalam pelaksanaannya terdapat kinerja yang kurang baik.

Dengan rendahnya kualitas sumberdaya manusia maka kebutuhan akan pendampingan masyarakat penerima bantuan adalah sangat penting terutama didalam pelaksanaan administrasi dan teknis di lapangan (SMERU, 2001). Selain itu tugas konsultan pendamping juga melakukan analisa kelayakan usaha, memberikan rekomendasi pencairan dana, memberikan bantuan dan bimbingan usaha kepada debitur dari aspek produksi, manajemen dan pemasaran.

Hal yang lebih penting dalam program ini, berkaitan dengan lemahnya sumberdaya manusia adalah menemukan apa dan dimana akar permasalahannya. Pengetahuan tentang akar permasalahan ini membantu untuk merumuskan suatu strategi pemecahan masalah yang lebih tepat dan efektif (Tampubolon, M. 2002).

Tujuan utama pengenalan terhadap pemberdayaan masyarakat bukan hasil fisik seperti kualitas bangunan melainkan tingkat pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Potensi Ekonomi Masyarakat Desa Nelayan (2002), di dalam menentukan kriteria penilaian untuk menentukan urutan prioritas jenis kegiatan yang didasarkan pada tujuan dan sasaran serta filosofi pemberdayaan masyarakat desa nelayan, diantaranya mengharuskan bahwa kegiatan tersebut harus dapat meningkatkan kesempatan berusaha dan tingkat kesehatan masyarakat dengan melibatkan sebanyak mungkin kegiatan usaha masyarakat baik secara individu maupun kelompok.

Berdasar penjelasan di atas maka diduga bahwa Identifikasi jenis kegiatan berpengaruh terhadap Perguliran Dana.

2.3. Kelembagaan

Dalam pelaksanaan program dana bergulir, keberadaan serta peran lembaga keuangan di tingkat desa adalah sangat penting. Hal ini mengingat sumberdaya manusia di desa atau petani nelayan pada umumnya masih rendah. Kramadibrata, dkk (2002) berpendapat bahwa untuk mencapai pembangunan pertanian yang berkelanjutan perlu adanya pemberdayaan lembaga informal yang terdapat pada masyarakat pedesaan. Pemberdayaan lembaga informal tersebut dilakukan dengan memperhatikan struktur sosial masyarakat seperti : sistem kepemimpinan, sistem nilai dan mobilisasi sosial melibatkan secara aktif dengan melakukan tukar menukar pengetahuan yang dimiliki masyarakat dan pengetahuan ilmiah. Sehingga dalam prakteknya kepentingan masyarakat dapat terlindungi dan taraf hidupnya meningkat. Dari adanya lembaga ini, terutama kegiatan penagihan dapat lebih terjamin karena adanya manajemen yang lebih baik dan profesional dibanding dengan bila tidak ada lembaga keuangan yang menangani hal ini secara khusus. Pendapat di atas tadi sesuai dengan petunjuk yang tertuang dalam Pedoman Umum PEMP, (2001) bahwa hendaknya dalam proses pemberdayaan masyarakat tersusun dalam bingkai pendekatan yang harmonis dengan memperhatikan sistem nilai dan kelembagaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat setempat, potensi lokal dan unit usaha masyarakat.

Mengambil contoh yang terjadi di Kab. Kapuas, pelaksanaan dana bergulir subsidi BBM dinilai terburu-buru, sehingga persiapan tidak matang dimana seleksi koperasi / LKM serta fasilitator terkesan kurang siap. Anggota pokja dari LSM yang turut menetapkan koperasi / LKM yang berhak memperoleh dana justru meragukan kelangsungan program dana bergulir ini karena koperasi belum siap (Rahayu, 2001).

Menurut Riyadi, M (2001) Prinsip dasar yang dikembangkan dalam pengelolaan berbagai bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat mengharuskan :

1. Transparan. Semua pihak dapat mengakses informasi tentang pelaksanaan dan perkembangan kegiatan.
2. Partisipatif sebagai bentuk kepedulian atas beban penduduk miskin.
3. Akuntabel. Dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
4. Quick disbursement. Cepat dalam penyampaian bantuan kepada masyarakat sasaran.
5. Terpadu terdapat koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program antar berbagai pihak berkepentingan.
6. Desentralisasi. Terdapat pendelegasian pengelolaan program kepada pemerintah daerah.

Prinsip dasar di atas hanya bisa dipenuhi apabila dalam pelaksanaan program perguliran dalam rangka memberdayakan masyarakat mampu membentuk lembaga di dalam masyarakat dan dibentuk oleh masyarakat itu sendiri. Hal ini sebagaimana yang disebut dalam Pedoman Umum PEMP., (2001), bahwa keberlanjutan kegiatan didasarkan pada prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat. Sedangkan keberlanjutan dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab Dinas Perikanan Kabupaten Kota. Struktur kelembagaan pasca proyek diarahkan pada upaya penumbuhan kemandirian LEPP M3 (Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina) serta KMP (Kelompok Masyarakat Pemanfaat) Desa.

Prinsip tersebut di atas juga dimaksudkan untuk agar terhadap kegiatan tersebut dapat dilakukan pengendalian dan pengawasan sebagaimana yang dituntut dalam program pemberdayaan, yaitu pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh masyarakat dan aparat pemerintah terkait. Sementara itu monitoring dan

evaluasi dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat. Masyarakat, baik peserta maupun masyarakat umum dapat mengadukan penyimpangan pelaksanaan program. Kemudian hasil evaluasi dan monitoring disampaikan oleh pelaksana kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten / Kota dan kemudian Kepala Dinas Perikanan Kabupaten / Kota Menyampaikan laporan kemajuan kegiatan kepada Dinas Perikanan Propinsi. (Pedoman Umum PEMP, 2001).

Dengan demikian, diduga bahwa Kelembagaan berpengaruh terhadap Perguliran Dana.

2.4. Pengelolaan Perguliran

Kondisi masyarakat pedesaan yang umumnya mempunyai tingkat pendidikan rendah mengakibatkan tingkat kesadaran terhadap kepentingan dan tujuan program juga sangat rendah. Dalam hal ini, sering terjadi suatu anggapan bahwa dana bergulir yang merupakan bantuan pemerintah adalah merupakan dana yang sifatnya hibah, sehingga mereka merasa bahwa mereka tidak perlu mengembalikan dana yang telah diberikan. Untuk mengantisipasi masalah ini maka ketika menentukan sasaran atau kelompok sasaran juga harus ditentukan pula kelompok tunggu. Kelompok tunggu ini yang nantinya akan juga berfungsi sebagai kontrol dan pengawas publik terhadap peminjam pertama (SMERU, 2001). Dalam ketentuan pengelolaan perguliran dana, maka setiap anggota kelompok yang memperoleh bantuan program dana bergulir, diwajibkan mengembalikan pinjaman yang berupa angsuran pokok dan ditambah dengan jasa kesepakatan kelompok. Dan selanjutnya dana tersebut harus digulirkan kembali tanpa harus menunggu seluruh pinjaman lunas kepada masing-masing anggota yang membutuhkan guna

lebih menguatkan dan memantapkan kegiatan kelompok. (Pedoman Umum P3EMDN, 2002).

Pengelolaan dana oleh kelompok masyarakat pemanfaat harus dilaksanakan secara terbuka dan diawasi oleh aparat desa / kelurahan, agar penyaluran dan pengembangan usaha tersebut dapat berjalan dengan lancar. Dana ekonomi produktif masyarakat yang dipinjamkan harus dikembalikan sesuai dengan kesepakatan agar terjadi akumulasi modal dan sirkulasi dana di daerah. (Pedoman Umum PEMP, 2001).

Dengan demikian, diduga bahwa pengelolaan perguliran berpengaruh terhadap Perguliran Dana.

2.5. Penelitian Terdahulu

1. Peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Rahayu dkk. (2001), mengambil sampel penelitian pada tiga kabupaten yang berbeda propinsi. Penelitian lapangan dilakukan dengan menggunakan metoda kualitatif dan teknik wawancara mendalam terhadap para pelaksana program, penerima dan bukan penerima program, aparat pemerintah, LSM, tokoh masyarakat. Pedoman pertanyaan digunakan sebagai acuan dalam penggalian informasi.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Tampubolon, (2002) lebih menitik beratkan pada pendidikan terhadap sumberdaya manusia.

2.6. Kerangka Penelitian Teoritis dan Hipotesis

2.6.1. Kerangka Penelitian Teoritis

1. Pengaruh sosialisasi terhadap perguliran dana.

Sosialisasi mempengaruhi perguliran dana melalui transparansi dan pemahaman para peserta terhadap perguliran dana dengan terjadinya diskusi yang terjadi ketika sosialisasi dilaksanakan dan pemahaman melalui intruksi tertulis.

2. Pengaruh identifikasi jenis kegiatan terhadap perguliran dana.

Identifikasi jenis kegiatan apabila dilakukan dengan tepat akan mengarah kepada kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga akan mengangkat motivasi peserta untuk melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya.

3. Pengaruh kelembagaan terhadap perguliran dana.

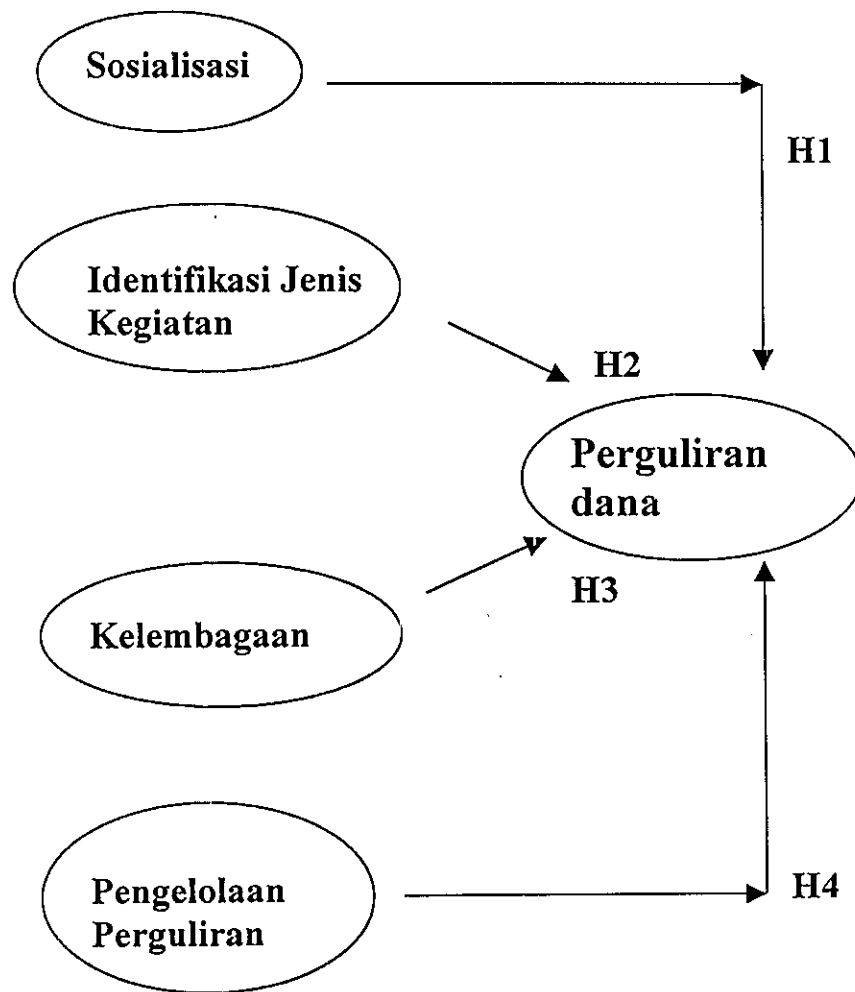
Terbentuk dan terlibatnya suatu lembaga akan menjamin proses administrasi menjadi lebih profesional, sehingga semua kegiatan peminjaman dapat tercatat dan dilaporkan dari sini.

4. Pengaruh pengelolaan perguliran terhadap perguliran dana.

Perguliran dana dapat berjalan dengan lancar apabila peserta mempunyai kesadaran yang tinggi untuk mengembalikan dana yang dipinjam, agar dapat digulirkan kembali.

Gambar I.1.

**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Perguliran Dana**



2.6.2. Hipotesis

Dari penjelasan di atas maka kami mengajukan hipotesis :

1. Variabel sosialisasi berpengaruh secara signifikan terhadap perguliran dana .
2. Variabel Identifikasi kegiatan berpengaruh secara signifikan terhadap perguliran dana.
3. Variabel kelembagaan berpengaruh secara signifikan terhadap perguliran dana .
4. Variabel pengelolaan perguliran berpengaruh secara signifikan terhadap perguliran dana .
5. Variabel sosialisasi, identifikasi kegiatan, kelembagaan dan pengelolaan perguliran secara serentak berpengaruh terhadap perguliran dana.

BAB III.

METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, populasi dan teknik pengambilan sample, metode pengumpulan data dan metode analisis. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dalam bentuk laporan.

Yang dimaksud dengan populasi adalah unit pinjaman yang diberikan kepada petani, nelayan atau bakul yang menerima bantuan dana bergulir. Karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya maka diambil sample dengan cara purposive random sampling. Teknik atau metode analisis yang digunakan yaitu, analisis regresi, uji koefisien regresi serentak (uji F), uji koefisien regresi induvidual (uji t) dan uji ekonometrika yang terdiri dari uji multikolinieritas, auto korelasi dan heteroskedastisitas.

3.1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari obyek penelitian yang sudah dalam keadaan siap digunakan dalam tahapan-tahapan analisis. Data jenis ini kebanyakan diambil sudah dalam bentuk laporan yang formal. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara seperti dari majalah, journal, buku literatur dll Dalam penelitian ini data diambil dari hasil laporan pelaksanaan program tersebut yang

dilaporkan ke Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah (Indriantoro dan Supomo, 1999).

3.2. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

3.3.1. Populasi

Populasi dari penelitian ini adalah unit pinjaman petani dan nelayan yang memperoleh dana bergulir, yang di danai baik melalui APBD maupun APBN Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah. Jumlah seluruh populasi adalah 709 unit.

3.3.2. Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan dengan mengirimkan format tabel yang harus diisi sesuai dengan kebutuhan yang dituntut oleh penelitian ini (lampiran I, II, dan III). Teknik pengambilan sample dilakukan dengan cara acak sederhana. Daerah yang diambil untuk sampel adalah Kab. Tegal, Magelang, Grobogan, Salatiga, Semarang, Kendal dan Kota Tegal. Hal ini disebabkan karena kondisi populasi merupakan suatu populasi yang dinilai homogen yaitu penduduk desa nelayan yang miskin dan bermata pencaharian dibidang perikanan dan kenelayanan.

Jumlah sample yang dibutuhkan dihitung berdasar rumus :

$$n = \frac{N}{(1 + N)(MeO)^2} \dots\dots\dots (1)$$

Dimana :

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

MeO = Margin of eror Max (10 %) (Rao Purba, 1996).

Sehingga perhitungan jumlah sampel berdasarkan rumus di atas adalah :

$$\begin{aligned}\text{Jumlah sampel} &= \frac{709}{710 \times (10\%)^2} \\ &= 99.85915 \text{ dari angka ini kemudian dibulatkan } 100\end{aligned}$$

Pengambilan sampel seperti tersebut di atas mengacu pada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh :

- a. Ida Bagus Mantra dan Kesto (Masri Singarimbun, 1989) menyatakan bahwa suatu penelitian tidak perlu meneliti semua individu dalam populasi karena disamping memakan biaya yang sangat besar juga membutuhkan waktu yang lama. Dengan meneliti sebagian dari populasi dan dengan cara pengambilan sample tertentu yang disesuaikan dengan kondisi populasi, diharapkan hasil yang diperoleh akan menggambarkan sifat populasi.
- b. William Emory (1996) mengatakan bahwa penentuan sample tidak harus selalu mengikuti seluruh populasi karena tidak ekonomis dan tidak efisien.

3.3. Definisi Operasional Variabel

a. Perguliran Dana

Adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah melalui Departemen Kelautan dan Perikanan yang diwujudkan dalam bentuk proyek pemberdayaan melalui sistem perguliran dana. Dimana dengan pemberdayaan ini diharapkan masyarakat akan mampu meningkatkan partisipasinya dalam membangun masyarakatnya sendiri serta kesinambungan peningkatan pendapatan.

b. Sosialisasi

Sosialisasi adalah sosialisasi yang dilakukan di tingkat desa / kelurahan setempat, yang dilakukan dengan penyebaran informasi program melalui berbagai media informasi desa dan pertemuan-pertemuan yang dilakukan di tingkat desa.

c. Identifikasi Jenis Kegiatan

Identifikasi kegiatan adalah merupakan kegiatan untuk menyusun prioritas kegiatan berdasarkan usulan dari masyarakat. Dari jenis kegiatan yang telah teridentifikasi, kegiatan yang paling banyak diusulkan merupakan kegiatan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat desa setempat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya daftar tunggu dari kegiatan yang bersangkutan.

d. Kelembagaan

Adalah terbentuk dan terlibatnya lembaga keuangan desa setempat, dimana aktifitas lembaga keuangan ini dibantu oleh tenaga teknis pelaksana program yang kemudian petugas tersebut melaporkan aktifitas kegiatan administrasi dan kegiatan pelaksanaan program di lapangan kepada petugas di tingkat kabupaten. Selanjutnya petugas kabupaten melaporkan ke tingkat propinsi.

e. Pengelolaan Perguliran

Adalah kesadaran penerima pinjaman dana untuk mengembalikan dana pinjaman sesuai dengan kesepakatan waktu pengembalian sehingga dana tersebut siap menjadi dana yang segera digulirkan kembali.

Tabel 3.1**Tabel Definisi Operasional variabel**

| VARIABEL | INDIKATOR | SKALA | PENGUKURAN |
|-----------------------------|------------------------------|----------|---|
| Sosialisasi | Jumlah media informasi | Ordinal | Menghitung jumlah media informasi yang digunakan |
| | Jumlah peserta | Ordinal | Menghitung jumlah peserta yang haadir pada saat pertemuan |
| Identifikasi jenis kegiatan | Jumlah daftar tunggu | Ordinal | Menghitung jumlah daftar tunggu |
| Kelembagaan | Laporan pelaksanaan | | Melihat ada / tidaknya arsip laporan |
| | Terlibatnya lembaga keuangan | | Melihat ada / tidaknya atau terbentuknya lembaga keuangan |
| Pengeloalaan perguliran | Ketepatan membayar angsuran | Ordinal | Melihat catatan pembayaran iuran |
| Perguliran dana | Peningkatan partisipasi | Ordinal | Menghitung peningkatan jumlah daftar tunggu |
| | Peningkatan pendapatan | Interval | Menghitung peningkatan hasil produksi |

3.4. Metode Analisis

Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan informasi dari para petugas Kabupaten / Kota di seluruh Jawa Tengah berupa data dengan skala interval, kemudian diolah dengan menggunakan program SPSS for Windows 10.0 dengan tahap analisis sbb:

3.4.1. Uji Hipotesis

Metode kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, secara simultan untuk menguji hipotesa yang diajukan, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh linier antara variabel bebas dan variabel tidak bebas

dan menganalisis pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel tak bebas yaitu sosialisasi, kesesuaian kegiatan, administrasi dan ketaatan membayar angsuran. . Mengingat dalam studi ini terdapat bukan hanya satu variabel bebas maka teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan bantuan paket program SPSS for windows release 10.0.

Persamaan fungsi regresi perguliran dana :

$$Y = f(X_1, X_2, X_3, X_4) \dots\dots\dots (2)$$

Dimana:

Y = Keberhasilan program perguliran dana

X1 = Sosialisasi

X2 = Identifikasi jenis kegiatan

X3 = Kelembagaan

X4 = Pengelolaan perguliran

Persamaan model regresinya

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4 + e \dots\dots\dots (3)$$

Uji ini dilakukan untuk menguji keseksamaan parameter terhadap Y secara bersama-sama. Untuk pengujian ini digunakan statistik uji F.

Langkah-langkah pengujian sebagai berikut:

1. $H_0: b_1 = b_2 = b_3 = b_4 = 0$

Ke lima variabel bebas secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat

2. $H_1: b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq b_4 \neq 0$

Ke lima variabel bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat

3. Level of signifikan, $\alpha = 0,1$
4. Statistik uji, pengujian dengan (0,1; df) dengan rumus rasio F yang menguji signifikansi model regresi adalah :

$$\frac{\sum (\hat{Y} - Y)^2 (K)}{\sum (Y - \hat{Y}) / (N - K - 1)} = \frac{R^2 / (K)}{(1 - R^2) / (n - k - 1)} \dots\dots\dots(4)$$

Uji selanjutnya adalah untuk melihat kesamaan parameter b1, b2, b3, dan b4 secara individual yaitu digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh hubungan antara satu variabel bebas dengan variabel terikat. Dalam pengujian ini digunakan statistik uji "t".

Langkah-langkah pengujiannya yaitu :

1. H0: bi = 0 (tidak terdapat pengaruh yang nyata antara satu variabel bebas terhadap variabel terikat)
H1: bi ≠ 0 (terdapat pengaruh yang nyata antara satu variabel bebas terhadap variabel terikat), level of signifikan, $\alpha = 0$)
2. Statistik uji, pengujian 2 arah dengan df = n - k - 1

$$t = \frac{b_i - B_i}{Se(b_i)} \dots\dots\dots(5)$$

Dimana bi adalah koefisien regresi ke i yang ditaksir, Bi adalah parameter ke i yang dihipotesakan dan Se (bi) adalah standar Bi dengan :

$$Se (B_i) = \frac{\sqrt{S^2}}{\sqrt{\sum X^2}} \quad \text{dan} \quad S^2 = \frac{1}{n - k - 1} \sum (y - Y)^2 \quad (\text{Anto Dajan 1986})$$

3.4.2. Uji Ekonometrika

Uji ekonometrika digunakan untuk memenuhi syarat agar persamaan yang diperoleh pada model linear regresi berganda dapat diterima secara ekonometrika. Uji ekonometrika meliputi :

a. Uji Multikolinieritas.

Istilah multikolinieritas adalah berarti adanya hubungan linier yang sempurna diantara variabel-variabel bebas dalam model regresi. Apabila hanya ada dua variabel bebas interkorelasi dapat diukur dengan koefisien korelasi sederhana atau koefisien korelasi order nol, akan tetapi kalau ada lebih dari dua variabel interkorelasi dapat diukur dengan koefisien korelasi parsial atau koefisien korelasi berganda antara satu variabel bebas dengan sisa variabel bebas lainnya secara simultan. Cara mengetahui kolinieritas ganda ada beberapa cara, sebagai berikut :

1. Kolinieritas sering dapat diduga kalau nilai R^2 cukup tinggi (misal antara 0,7 dan 1) dan kalau koefisien korelasi sederhana juga tinggi akan tetapi tidak satupun atau sedikit sekali koefisien regresi parsial yang signifikan secara individu kalau dilakukan uji t.
2. Meskipun koefisien korelasi sederhana nilainya tinggi sehingga timbul dugaan bahwa terjadi kolinieritas ganda akan tetapi belum tentu berlaku untuk kasus tertentu. Dalam model regresi linier berganda, harus juga melihat pada nilai koefisien regresi parsial.

3. Apabila dibuat regresi untuk setiap variabel bebas terhadap sisa variabel lainnya dengan menghitung nilai R^2 dan F, dan apabila nilai F hitung berdasarkan data observasi dari sampel ternyata lebih besar dari nilai F tabel dengan tingkat signifikansinya nyata maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas tersebut memang berkorelasi dengan sisa variabel bebas lainnya.

b. Uji Autokorelasi

Salah satu asumsi dari model linier klasik adalah bahwa tidak ada autokorelasi antara kesalahan pengganggu. Jadi autokorelasi merupakan korelasi antara anggota seri observasi yang disusun menurut urutan waktu (data timeseries) atau menurut urutan tempat (data crossection) atau korelasi pada dirinya sendiri. Untuk mengetahui adanya autokorelasi dapat dilihat dengan metode analisa statistik d Durbin Watson. Prosedur uji d Durbin Watson apabila semua asumsi sudah dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Membuat regresi dengan OLS dan hitung perkiraan kesalahan pengganggu
$$e_i = Y_t - Y_t$$
2. Menghitung nilai d
3. Untuk nilai n dan banyaknya variabel bebas tertentu, cari nilai kritis d_L dan d_U dari tabel.
4. Kalau hipotesa H_0 : tak ada korelasi serial positif kemudian apabila
 $d < d_L$: tolak H_0
 $d > d_U$: terima H_0
 $d_L \leq d \leq d_U$; tak dapat disimpulkan

5. Kalau hipotesa nol, H_0 ; tak ada korelasi serial negatif, kemudian apabila :
 - $d > 4 - d_L$: tolak H_0
 - $d < 4 - d_u$: terima H_0
 - $4 - d_u \leq d \leq 4 - d_L$; tak dapat disimpulkan
6. Kalau H_0 dua arah yaitu tak ada korelasi serial positif atau negatif, kemudian apabila :
 - $d < d_L$: tolak H_0
 - $d > 4 - d_L$: tolak H_0
 - $d_u < d < 4 - d_u$: terima H_0
 - $d \leq d_u$ atau $4 - d_u \leq d \leq 4 - d_L$; tak dapat disimpulkan.

c. Uji Heteroskedastisitas

Salah satu asumsi penting dalam model regresi linier klasik adalah bahwa kesalahan pengganggu E_i mempunyai varian yang sama, asumsi ini disebut homoskedastik sedangkan yang sebaliknya, disebut heteroskedastik. Beberapa uji untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas diantaranya adalah : metode grafik, uji Gleyser, uji korelasi rank dari Spearman dan uji dari Park.

BAB IV.

ANALISIS DATA

4.1. Gambaran Umum Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah

4.1.1. Keadaan Alam dan Iklim

Propinsi Jawa Tengah merupakan salah satu dari 27 propinsi di Indonesia, terletak pada $5^{\circ}30'$ LS – $8^{\circ}30'$ LS dan $108^{\circ}30'$ BT – $111^{\circ}30'$ BT. Jarak terjauh dari Barat ke Timur adalah 263 km dan dari Utara ke Selatan 226 km (tidak termasuk pulau Karimunjawa).

4.1.2. Batas dan Luas Wilayah

Sebelah Utara : Laut Jawa

Di sebelah Utara ini terdapat Kabupaten dan Kota antara lain: Kabupaten Brebes, Tegal, Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, Kudus, Demak, Pati, Rembang dan Kota Tegal, Pekalongan, Semarang.

Sebelah Timur : Propinsi Jawa Timur

Di perbatasan sebelah timur ini terletak Kabupaten Rembang, Blora, Sragen, Karanganyar dan Wonogiri

Sebelah Selatan : Samudera Indonesia dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Di wilayah perbatasan ini terletak Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, Magelang, Klaten dan Wonogiri

Sebelah Barat : Propinsi Jawa Barat

Di wilayah perbatasan sebelah barat ini terletak Kabupaten Brebes dan Cilacap.

Selain wilayah tersebut, wilayah Propinsi Jawa Tengah ini masih ditambah dengan kepulauan Karimunjawa yang terletak di laut Jawa Tengah yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Jepara dan Pulau Nusakambangan di Samudera Hindia yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Cilacap. Luas daerah propinsi Jawa Tengah 32.284,268 km², atau 23,97 % dari luas Pulau Jawa. Panjang pantai sebelah Utara dari Brebes sampai Rembang 453,9 km dan sebelah Selatan dari Cilacap sampai Wonogiri, (kecuali Yogyakarta) 202,2 km. Total 656,1 km, atau 0,81 % dari pantai Indonesia.

4.1.3. Topografi dan Jenis Tanah

Jawa Tengah dari segi topografi terdiri dari daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi dan perbukitan dengan pegunungan yang landai dan curam. Berdasarkan letak ketinggian tempat dari permukaan laut dapat digolongkan dalam 4 (empat) klasifikasi, yaitu :

- Ketinggian 1 – 100 meter, meliputi 53,3 %
- Ketinggian 100 – 500 meter, meliputi 27,4 %
- Ketinggian 500 – 1000 meter, meliputi 14,7 %
- Ketinggian 1000 meter ke atas meliputi 4,6 %

Berdasarkan derajat kemiringan dikelompokkan menjadi :

- Derajat kemiringan $0^{\circ} - 2^{\circ}$ meliputi 41,3 %
- Derajat kemiringan $2^{\circ} - 15^{\circ}$ meliputi 27,7 %
- Derajat kemiringan $15^{\circ} - 40^{\circ}$ meliputi 21,2 %
- Derajat kemiringan 40° ke atas meliputi 9,8 %

Jenis tanah yang terdapat meliputi : Tanah latosol, tanah aluvial, tanah grumosol, tanah regosol, tanah mediteran merah kuning, tanah litosal, tanah andosal, tanah hidromorf, tanah podsolik merah kuning.

4.1.4. Iklim

Jawa Tengah memiliki iklim tropis dengan musim hujan dan musim kemarau yang silih berganti setiap tahunnya. Suhu bulanan minimum $21,3^{\circ}\text{C}$, maksimum $30,7^{\circ}\text{C}$ dan kelembaban rata-rata sebesar 24,7 %. Jumlah curah hujan dalam waktu setahun berkisar 1.547 – 3.989 mm/th, sehingga Jawa Tengah termasuk daerah yang beriklim basah. Umumnya curah hujan tersebut terbagi tidak merata sepanjang tahun, dimana pada bulan tertentu hujannya cukup banyak, yaitu antara bulan Oktober sampai Maret. Pada bulan-bulan tersebut hari hujan lebih dari 10 hari hingga 22 hari atau sampai satu bulan. Adapun pada bulan April sampai dengan September, hujan agak berkurang sehingga dalam periode satu tahun

terbagi menjadi 2 bagian waktu, yaitu setengah tahun musim hujan dan setengah tahun musim kemarau. Laporan Tahunan Dinas Perikanan Propinsi Jawa Tengah.

4.1.5. Potensi Sumberdaya Perikanan Jawa Tengah

Jumlah penduduk Jawa Tengah dilihat dari mata pencaharian di bidang perikanan (nelayan, petambak, dan budidaya perikanan) pada tahun 1999 adalah 362.794 orang. Sementara itu jumlah TPI (Tempat Pelelangan Ikan) di Jawa Tengah adalah 95 buah, tambak dengan luas 24.899 Ha, kolam 26.887,06 Ha, sawah 6.930 Ha, karamba 28 Ha, rawa 3.641 Ha, waduk 4.186,6 Ha, telaga 1.808 Ha dan sungai 17.754 Ha. (Perikanan Jawa Tengah Dalam Angka, 2001).

Di masa yang mendatang, pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan akan lebih ditingkatkan dan diperluas menuju berbagai industri perikanan dan kelautan (maritim) yang dapat dipasarkan dan menguntungkan, dengan pengelolaan yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan sumberdaya perikanan dan kelautan itu sendiri. Masukan IPTEK, dukungan sumberdaya manusia yang berkualitas, kerja sama antar instansi terkait atau lembaga pemerintah lainnya dan kemitraan antara pemerintah dan swasta, penyempurnaan peraturan perundang undangan yang mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi peningkatan

pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan serta pengelolaannya merupakan hal yang perlu mendapat perhatian yang sungguh – sungguh.

Disamping perkembangan yang cukup menggembirakan di bidang pembangunan perikanan dan kelautan di Jawa Tengah, masih terdapat hal – hal yang perlu mendapat perhatian, diantaranya adalah masih rendahnya eksploitasi sumberdaya ikan demersaldi laut Jawa serta belum dimanfaatkannya secara optimal perairan ZEE di Selatan Jawa Tengah. Disamping itu banyak organisme laut yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan industri, termasuk di dalamnya industri farmasi, kimia, pertanian maupun jasa lingkungan, belum trermanfaatkan sama sekali. Disisi lain, Waduk / bendungan sebagai lahan budidaya ikan dan penangkapan juga belum dimanfaatkan secara optimal. (Perencanaan Strategik Dinas Perikanan dan Kelautan Tahun 2001 – 2005, 2001).

4.1.6. Kebijakan Pembangunan Perikanan

Pembangunan perikanan dalam tahun anggaran 2000/2001 merupakan masa pemulihan krisis, dengan demikian kegiatan proyek diprioritraskan untuk kegiatan-kegiatan yang langsung mengena ke masyarakat petani/nelayan, karena mereka adalah sebagai pelaku ekonomi perikanan yang tiada lain adalah dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan perikanan.

Menurunnya produksi perikanan tahun 1998 tidak terlepas dari kondisi krisis ekonomi dan moneter yang terjadi dewasa ini, sehingga sangat berpengaruh terhadap aktivitas kegiatan nelayan. Mahalnya suku cadang mesin motor tempel maupun kapal motor, bahan pembuatan jaring, kebutuhan pokok melaut mengakibatkan berkurangnya sarana perikanan yang dioperasikan. Dengan demikian produktivitas usaha perikanan juga semakin merosot.

Sedangkan meningkatnya nilai produksi tahun 1998 karena pada saat krisis ekonomi dan moneter, nilai rupiah terhadap dolar turun, sehingga mengakibatkan kenaikan harga di semua sektor. Hal tersebut untuk mengimbangi biaya operasional usaha yang meningkat.

Oleh karena itu kebijaksanaan dan kegiatan-kegiatan dalam program pembangunan subsektor perikanan Jawa Tengah, secara umum masih tetap diarahkan untuk pemantapan pelaksanaan sistem agrobisnis yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta isu yang berkembang, sedangkan prioritas kegiatan untuk tahun anggaran 2000 / 2001 difokuskan pada peningkatan ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi petani nelayan dan peningkatan produksi dan daya saing komoditas ekspor maupun komoditas substitusi impor.

Mengingat bahwa sebagian besar usaha perikanan yang ada di Jawa Tengah masih terdiri dari perikanan skala kecil, maka sasaran kegiatan program pembangunan perikanan tahun anggaran 2000 / 2001 diarahkan

untuk meningkatkan ketahanan pangan, pemberdayaan petani / nelayan kecil dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan produksi dan komoditas ekspor untuk meningkatkan devisa negara. (Rapat Koordinasi Pembangunan Pertanian Propinsi Jawa Tengah, 1999).

4.1.7. Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah

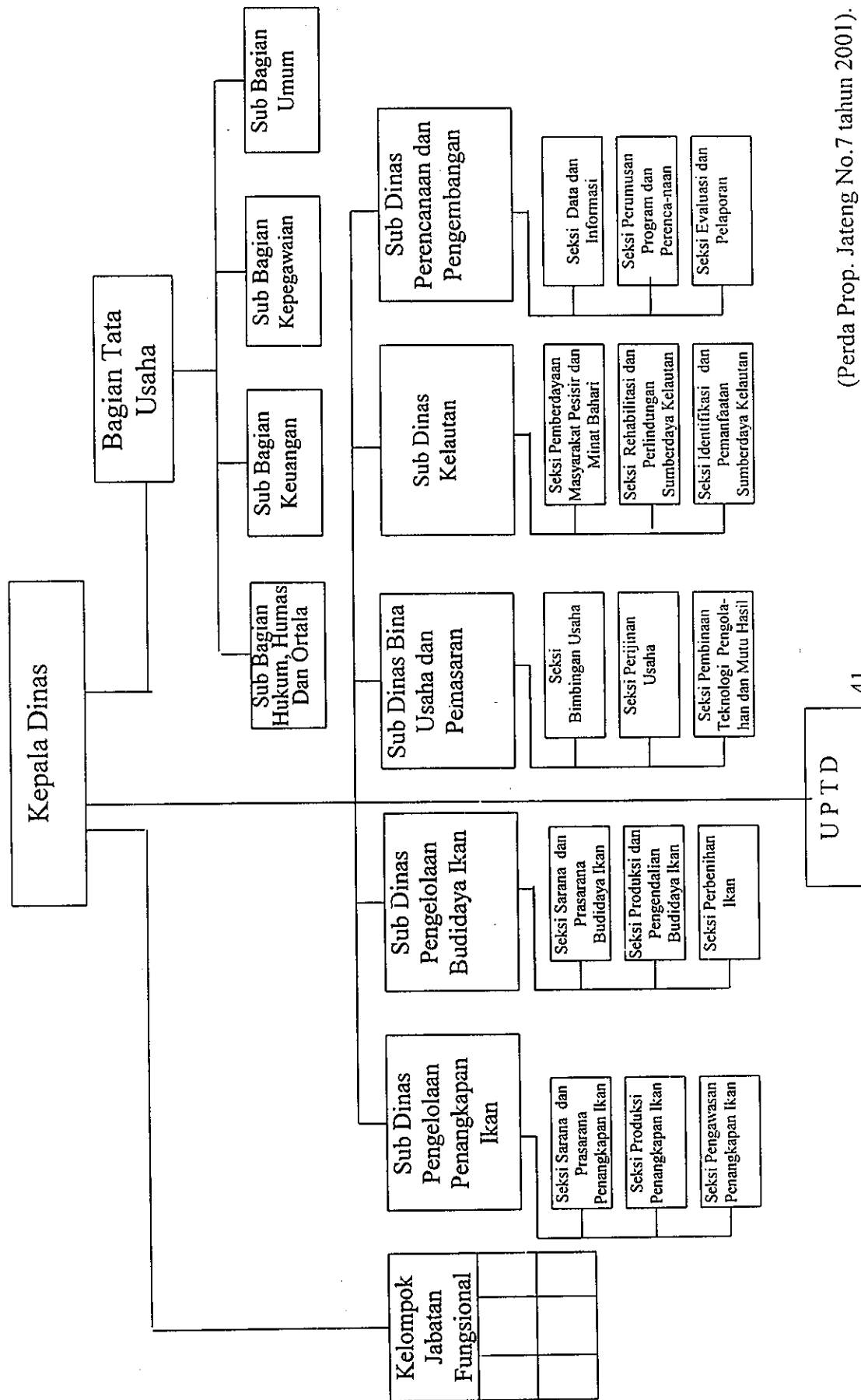
Dinas Perikanan dan Kelautan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perikanan dan Kelautan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok sbb :

- a. Melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Perikanan dan Kelautan yang diserahkan kepada pemerintah daerah ;
- b. Melaksanakan kewenangan di bidang Perikanan dan Kelautan yang bersifat lintas Kabupaten / Kota ;
- c. Melaksanakan kewenangan Kabupaten / Kota di bidang perikanan dan Kelautan yang dikerjasamakan dengan atau diserahkan kepada propinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Melaksanakan kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur dan tugas pembantuan di bidang Perikanan dan Kelautan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Perda
Prop. Jateng No.7 tahun 2001).

Gambar 4.1.

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
PROPINSI JAWA TENGAH**



4.2. Proses dan Hasil Analisis Data

Dalam usaha untuk memecahkan masalah tersebut maka peneliti mencoba memberikan beberapa pertimbangan dengan menguji beberapa faktor – faktor yang diduga berpengaruh terhadap perguliran dana. Faktor – faktor tersebut adalah sosialisasi, Identifikasi kegiatan, kelembagaan, dan pengelolaan perguliran.

4.2.1 Hasil Uji Terhadap Penyimpangan Asumsi Klasik Regresi Linier

Dalam pembahasan berikut ini akan dibahas persoalan persoalan yang berkaitan dengan pelanggaran asumsi klasik yaitu multikolinieritas, otokorelasi dan heteroskedastisitas.

Daftar tabel dibawah ini ditunjukkan hasil uji koefisien korelasi antar variabel bebas, yang menunjukkan ada atau tidaknya multikolinieritas.

Tabel 4.1. Tabel Koefisien Korelasi Pearson

| Correlations | | | | | | |
|------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | Y | X1 | X2 | X3 | X4 |
| Pearson Correlation | Y | 1.000 | .605 | .528 | .469 | .613 |
| | X1 | .605 | 1.000 | .534 | .461 | .598 |
| | X2 | .528 | .534 | 1.000 | .366 | .582 |
| | X3 | .469 | .461 | .340 | 1.000 | .428 |
| | X4 | .613 | .598 | .582 | .428 | 1.000 |
| Sig. (1-tailed) | Y | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| | X1 | .000 | | .000 | .000 | .000 |
| | X2 | .000 | .000 | | .001 | .000 |
| | X3 | .000 | .000 | .001 | | .000 |
| | X4 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| N | Y | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | X1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | X2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | X3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | X4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Dari data analisis korelasi dengan metode pearson, koefisien korelasi menggambarkan kekuatan hubungan antar variabel. Koefisien tersebut menunjukkan tidak adanya hubungan yang kuat antar variabel bebas. Dengan demikian menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas. Selain itu dari tabel di bawah ini, angka koefisien korelasi sederhana (Zero order) menunjukkan angka yang rendah sedangkan dari tabel 4.5 angka R^2 cukup rendah dan angka VIF menunjukkan angka koefisien yang kurang dari 5 sedangkan angka tolerance menunjukkan angka yang lebih dari 0.2 Dengan demikian tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 4.2.

Koefisien Kolinieritas Statistik

| Model | Correlations | | | Collinearity statistics | |
|----------|--------------|---------|------|-------------------------|-------|
| | Zero order | Partial | Part | Tolerance | VIF |
| Constant | | | | | |
| X1 | .605 | .277 | .204 | .550 | 1.818 |
| X2 | .528 | .179 | .129 | .606 | 1.651 |
| X3 | .469 | .175 | .126 | .750 | 1.333 |
| X4 | .613 | .280 | .206 | .528 | 1.894 |

Sedangkan untuk mengetahui ada tidaknya otokorelasi maka di bawah ini, hasil uji Durbin Watson

Tabel 4.3. Tabel Hasil Uji Durbin-Watson

Model Summary

| Model | Durbin-Watson |
|-------|---------------|
| 1 | 1.763 |

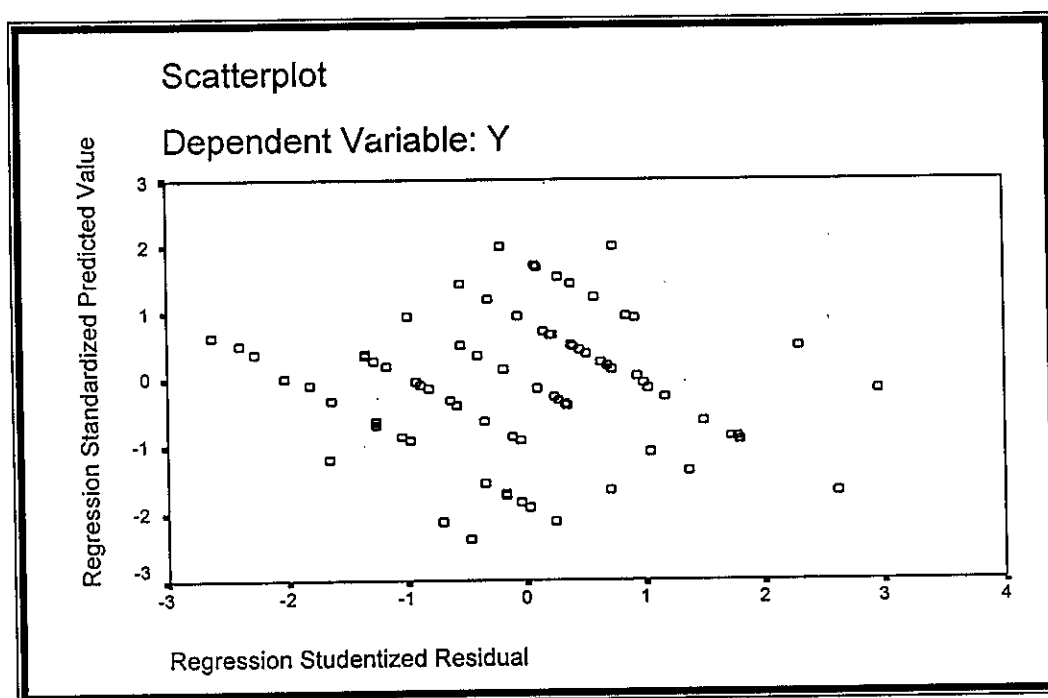
a Predictors: (Constant), X4, X3, X2, X1

b Dependent Variable: Y

Hasil uji otokorelasi dengan Durbin Watson menunjukkan nilai d hit sebesar 1,763. Nilai ini dibandingkan dengan nilai tabel dengan derajat kepercayaan 1% dimana nilai d_L (batas bawah) = 1.46 dan d_U (batas atas) = 1.63, maka nilai d hit (1,763) lebih kecil dari nilai d_U (1,63) dan lebih besar dari nilai d_L (1,46), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi otokorelasi dalam model regresi.

Sedang untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas, dapat dilihat dari grafik sebaran *scatterplot* di bawah ini yang menunjukkan bahwa titik-titik yang terbentuk tersebar secara acak di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola atau trend tertentu, sehingga model regresi linier memenuhi syarat untuk memprediksi dependent variabel.

Gambar 4.2. Diagram Pencar Variabel Regresi

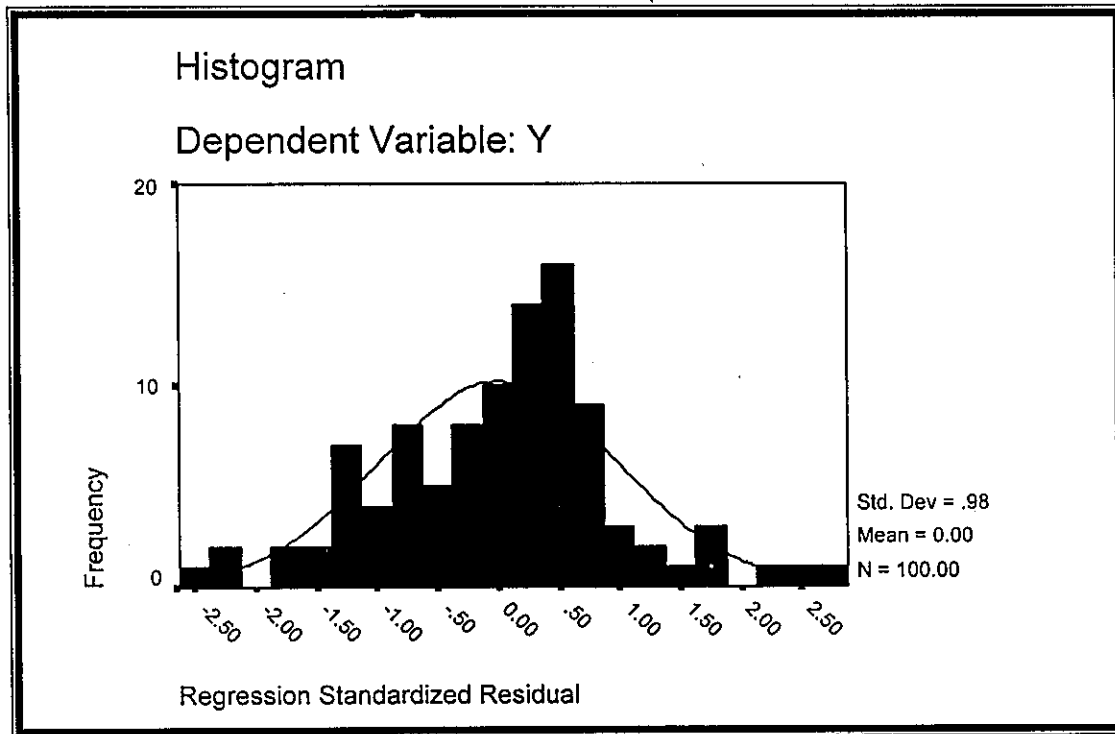


Grafik di atas tidak menunjukkan trend tertentu sehingga menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Sedangkan dari grafik normalitas di bawah ini menunjukkan bahwa histogram residual memberikan pola distribusi yang mendekati normal

Gambar 4.3.

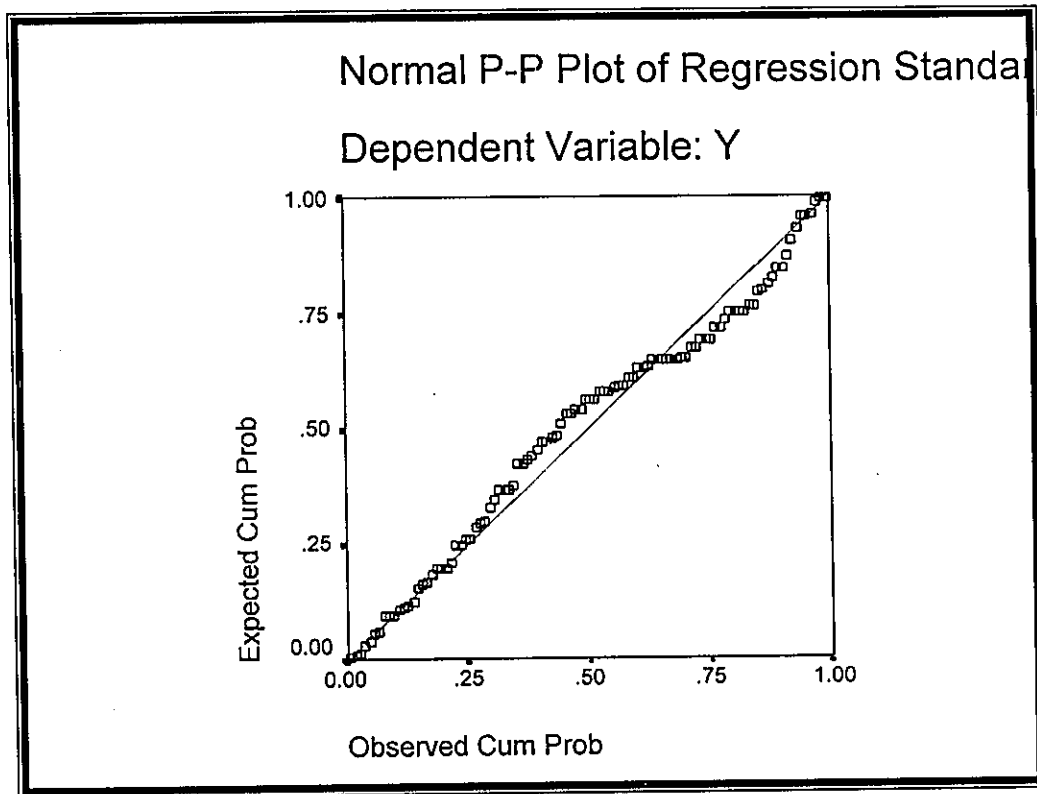
Grafik Histogram



Dari grafik normal P-P Plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal sehingga model tersebut layak digunakan dalam model regresi.

Gambar 4.4.

Grafik Normalitas



Berdasarkan dari kedua grafik tersebut (gambar 4.3 dan gambar 4.4) di atas menunjukkan bahwa regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

4.2.2. Hasil Uji Hipotesis

Hasil analisis regresi antara keberhasilan program dana (Y) dengan sosialisasi (X₁), identifikasi jenis kegiatan (X₂), kelembagaan (X₃) dan pengelolaan perguliran (X₄) di dapatkan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 0,758 + 0,321 X_1 + 0,151 X_2 + 0,123 X_3 + 0,256 X_4 + e$$

4.2.2.1. Hasil Uji “t”

Sementara itu hasil uji hipotesis secara parsial dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5.

Hasil Uji “t”

| Model | Unstandardized coefficients | | Standardized coefficients | t | Sig |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | .758 | .318 | | 2.381 | .019 |
| X1 | .321 | .115 | .271 | 2.781 | .007 |
| X2 | .151 | .088 | .160 | 1.718 | .089 |
| X3 | .123 | .062 | .168 | 2.005 | .048 |
| X4 | .256 | .089 | .286 | 2.872 | .005 |

Nilai kritis untuk pengujian dengan sampel $n=100$ dan jumlah variabel 5 adalah $t(95 ; 0,025)$. Karena pengujian dua sisi maka penentuan t tabel menggunakan $\alpha/2$ dan nilai $df = 100-5 = 95$ dan nilai tabel = 1,985 dan - 1,985. Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data dengan uji ‘t’ dengan taraf signifikansi 5 % , nilai t hitung untuk b_1 adalah 2,781 yang berarti lebih besar dari t tabel dan angka uji variabel sosialisasi adalah 0.007, dengan demikian sosialisasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perguliran dana. Variabel identifikasi kegiatan mempunyai nilai t hitung untuk b_2 adalah 1,718 yang lebih kecil dari t tabel yang berarti angka tersebut di atas menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan. Sedangkan variabel kelembagaan mempunyai nilai t hitung untuk b_3 adalah 2,005 lebih besar dari nilai t tabel, yang berarti variabel kelembagaan mempunyai

pengaruh yang signifikan. Demikian juga pengelolaan perguliran mempunyai nilai t hitung untuk b_4 adalah 2,872 yang lebih besar dari nilai t tabel dan menunjukkan angka uji 0.006, yang menunjukkan pengaruh yang nyata secara parsial terhadap variabel dependent.

4.2.2.2 Hasil Uji “F”

Hasil uji F disajikan pada tabel 4.6 dibawah ini :

Tabel 4.6.

Tabel Hasil Uji “F”

| Model | Sum of Square | Df | Mean Square | F | Sig |
|------------|---------------|----|-------------|---------------|------------------|
| Regression | 28.985 | 4 | 7.246 | 23.984 | 000 ^a |
| Residual | 28.702 | 95 | .302 | | |
| Total | 57.688 | 99 | | | |

Dalam penelitian ini nilai kritis F (4 ; 95 ; 0,05) adalah 2,47 , sedangkan nilai statistik F hasil perhitungan adalah 23,984 yang berarti F hitung lebih besar dari F tabel sehingga hasil uji terhadap faktor –faktor tersebut menunjukkan bahwa secara bersama – sama faktor – faktor tersebut berpengaruh nyata terhadap perguliran dana. Sedangkan dari tabel hasil uji “R²” di bawah ini menunjukkan bahwa nilai R² adalah 0.502. Hal ini menunjukkan bahwa 50,2 % perubahan variabel Y (dependent) dipengaruhi oleh perubahan variabel Xi (independent), sisanya sebesar 49,8 dipengaruhi oleh faktor lain.

Tabel 4.7.

Tabel R²

| Model | R | R Square | Adjusted R Square |
|-------|-------------------|----------|-------------------|
| 1 | .709 ^a | .502 | .482 |

4.2.3. Pembahasan Hasil Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data dengan uji 't' dengan taraf signifikansi 5 % diperoleh angka uji signifikansi 0.007, dengan demikian sosialisasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perguliran dana. Hasil ini sesuai dengan pendapat Riyadi. M, (2001), yang menyatakan bahwa sosialisasi memang merupakan faktor yang sangat penting dalam program perguliran dana. Kunci utama untuk membentuk partisipasi aktif masyarakat serta untuk meningkatkan pengamanan perguliran dana (pemberdayaan) melalui sistem pengawasan masyarakat adalah dengan sosialisasi. Suatu kegiatan sosialisasi yang berhasil baik akan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Yang selanjutnya peningkatan ketiga sifat tersebut akan meningkatkan pengaman bagi kegiatan program perguliran dana.

Hal kedua yang juga sangat penting adalah identifikasi kegiatan. Identifikasi kegiatan di desa dilakukan melalui musyawarah desa dengan mengundang berbagai lapisan masyarakat (Pedoman Umum P3EMDN, 2002). Diharap kegiatan usaha yang dipilih atau diprioritaskan untuk mengentaskan kemiskinan (untuk memberdayakan) adalah kegiatan yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat di daerah tersebut, sebagaimana yang diungkapkan oleh Tim Koordinasi Pengelolaan

Program Nasional Penciptaan Lapangan Kerja Produktif, (2002) bahwa dana tersebut hendaknya diarahkan untuk pengembangan kegiatan ekonomi produktif masyarakat skala kecil dan menengah yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah dengan mandasikan pada kebutuhan pasar. Dengan demikian diharap kegiatan tersebut akan dapat dijamin keefektifan dan efisiensinya.

Mayne, (1998) mengatakan bahwa keberhasilan suatu kegiatan usaha pada suatu komunitas adalah karena kegiatan tersebut merupakan “ *the best interests* “ bagi komunitas yang bersangkutan. Karena dengan kondisi demikian maka diharap motivasi akan muncul. Sedangkan menurut Beaubien, (2001) dengan munculnya motivasi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan maka akan tercipta iklim atau budaya yang akan memberikan rangsangan yang sesuai bagi suatu kelompok atau individu untuk meningkatkan usaha dan hasil yang diinginkan.

Dari hasil uji ‘t’ (nilai signifikansi = 0.089) menunjukkan bahwa identifikasi jenis kegiatan tidak berpengaruh nyata pada level signifikansi 5%, terhadap keberhasilan perguliran dana. Hal ini disebabkan karena ; Pertama, meskipun usaha mereka berhasil, sebagian dari mereka mempunyai kesadaran yang kurang terhadap perguliran dana bagi pengentasan kemiskinan. Sebagian dari mereka berpikir bahwa dana dari pemerintah ini sifatnya hanya hibah, karena memang ada program lain berupa pemberian dana yang sifatnya hibah (SMERU, 2001). Kedua, mereka tahu bahwa meskipun mereka tidak mengembalikan dana tersebut, sangsi dari pemerintah tidak ada. Kelemahan ini digunakan oleh sebagian petani / nelayan yang nakal untuk tidak mengembalikan uang pinjaman tersebut. Sehingga ketika dana untuk operasional penagihan kurang, maka mereka pun jadi malas untuk memenuhi

kewajibannya. Namun demikian pada level signifikansi 10 % menunjukkan pengaruh yang nyata.

Dengan kondisi petani / nelayan kecil yang seperti sekarang ini dimana mereka hanya mempunyai modal yang sangat kecil serta penghasilan yang tergantung pada musim, maka tidak heran bila bank-bank umum jarang ada yang mau melayani kebutuhan petani / nelayan akan modal. Pada akhirnya mereka terjebak pada sistem rentenir yang justru semakin mencekik kehidupan ekonominya. Oleh karena itu keberadaan bank pembangunan perikanan sangat dibutuhkan oleh para petani dan nelayan. (Riyadi, M., 2002).

Bank perikanan akan dituntut profesionalismenya karena karakteristik yang khusus yang dimiliki bidang perikanan. Keberadaan dana bergulir ini diharap akan mampu menjadi awal munculnya bank-bank perikanan di tingkat desa. Oleh karena itu segala kebutuhan bagi terbentuknya bank perikanan harus dipenuhi. Terutama dalam hal ini adalah tenaga profesional yang mengetahui kapan kebutuhan input produksi seperti pupuk, obat-obatan, pakan, umpan, kapal dan peralatan lainnya harus diadakan sehingga menghasilkan input produksi yang tepat waktu : tanam, tebar benih, tangkap dan sebagainya. Lembaga perbankan khusus tersebut sangat dibutuhkan keberadaannya oleh mereka dan memang telah terbukti mampu mengangkat derajat kehidupan masyarakat petani termasuk nelayan.

Berdasar penelitian yang dilakukan peneliti, menunjukkan bahwa secara individu variabel ini berpengaruh nyata (dengan nilai signifikansi = 0.048) pada taraf signifikansi 5 %. Hal ini ternyata disebabkan terbentuk dan terlibatnya lembaga akan menjamin administrasi lebih profesional sehingga semua kegiatan

peminjaman dapat tercatat dan dilaporkan dan dapat terpantau kegiatan tersebut. Hal ini akan berakibat positif pada keberhasilan program perguliran dana.

Dalam pengelolaan perguliran, niat baik dari para petani / nelayan untuk mengembalikan dana sangat berperan. Kesadaran mereka untuk membangun dirinya sendiri merupakan hal yang penting pula. Bila dana ini sejak pertama kali sudah tidak dapat bergulir maka bisa dipastikan bahwa program ini akan gagal. Pengaruh pengelolaan perguliran ini yang diukur dengan indikator ketaatan membayar angsuran, berdasar hasil penelitian menunjukkan pengaruh yang nyata pada taraf signifikansi 5 % , dengan nilai signifikansi 0.005.

Dari hasil uji tersebut di atas diperoleh rumus regresi linier yang menunjukkan pengaruh dari variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel tak bebas. Dari rumus tersebut menunjukkan bahwa apabila faktor-faktor yang mempengaruhi tidak ada maka tingkat keberhasilan perguliran dana adalah sebesar 0,758. Sedangkan masing-masing variabel mempunyai kontribusi sebesar 0,321 untuk setiap kenaikan satu unit pengukuran variabel X_1 , 0.151 untuk X_2 , 0.123 untuk X_3 dan 0,256 untuk X_4 , terhadap keberhasilan perguliran dana.

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Dari hasil analisis secara statistik dan hasil uji yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut::

5.1. Kesimpulan Hipotesis

Terbentuknya Y (penguliran dana) dipengaruhi oleh variabel :

- a. X1 (Sosialisasi) menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap variabel dependen Y.
- b. X2 (Identifikasi kegiatan) tidak menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap variabel dependen Y.
- c. X3 (Kelembagaan) menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap variabel dependen Y.
- d. X4 (Pengelolaan penguliran) menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap variabel dependen Y.
- e. Secara bersama – sama ke empat variabel independent tersebut menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap variabel dependen Y

Variabel X1, X3 dan X4 menunjukkan korelasi yang cukup kuat terhadap variabel dependen Y, sedangkan X2 kurang kuat. Hal ini bukan berarti bahwa variabel tersebut kurang berpengaruh, melainkan memang ada faktor-faktor lain yaitu kesadaran petani / nelayan dalam memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana pinjaman tersebut, sehingga variabel X2 menjadi kurang berpengaruh pada level

signifikansi 0,05 namun demikian masih menunjukkan pengaruh yang nyata pada level signifikansi 0,10.

5.2. Kesimpulan Masalah Penelitian

Untuk mengurangi sebanyak mungkin kemungkinan kegagalan perguliran dana ini, maka peneliti telah meneliti beberapa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perguliran dana. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh adalah Sosialisasi, Kelembagaan dan Pengelolaan perguliran.

Faktor sosialisasi akan menjamin transparansi dan kesamaan persepsi antar pelaksana dan pelaku program perguliran. Sedangkan identifikasi kegiatan kurang berpengaruh pada taraf signifikansi 5% karena identifikasi kegiatan yang dilakukan kurang tepat untuk mengarah pada kegiatan yang dibutuhkan masyarakat. Faktor kelembagaan berpengaruh pada signifikansi 5% karena terbentuk dan terlibatnya suatu lembaga akan menjamin proses administrasi menjadi lebih profesional. Sedangkan faktor pengelolaan perguliran sangat menentukan keberhasilan perguliran, berkaitan dengan kelestarian/ kelangsungan program perguliran.

5.3. . Implikasi Pada Kebijakan Manajemen

Program perguliran dana yang diarahkan untuk mengembangkan potensi desa nelayan serta untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, menekankan pada aspek pengembangan kegiatan usaha, (Pedoman Umum P3EMDN, 2002) dalam pelaksanaannya harus menyesuaikan dengan kondisi masyarakat desa yang spesifik. Merumuskan pola pemberdayaan ini rumit karena karakteristik mereka yang

berbeda serta pola pikir mereka yang sangat lokalit, terbelakang, statis tradisional, sulit berubah, lambat mengadopsi inovasi, serta tidak berdaya untuk hidup mandiri. (Tampubolon, 2002). Oleh karena itu diharap dengan mengetahui faktor – faktor yang berpengaruh terhadap perguliran dana, akan sangat membantu dan mempunyai peran dalam keberhasilan program perguliran dana dalam rangka memberdayakan masyarakat desa nelayan.

Sosialisasi merupakan faktor yang sangat penting, dimana dengan sosialisasi akan lebih terjamin transparansi dari pelaksanaan program ini. Dengan sosialisasi pula akan tercipta kesamaan pandangan dan pengertian akan program (Rahayu, 2001). Melalui sosialisasi motivasi masyarakat bisa ditingkatkan sehingga dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan program akan lebih efektif dan efisien (Beaubien, 2001). Masyarakat dapat dimotivasi bahwa keberhasilan program ini adalah untuk mereka sendiri. Bila ini berhasil maka mereka akan mempunyai lembaga penjamin modal bagi pengembangan usaha mereka selanjutnya.

Sedangkan pengelolaan perguliran juga merupakan kunci keberhasilan pelestarian program. Apabila hal ini tidak dapat terlaksana dengan baik, maka meskipun kegiatan usaha yang mereka lakukan berhasil namun perguliran tidak akan terlaksana, sehingga petani/ nelayan lain tidak memperoleh bantuan dana.

Melihat pada hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka diketahui beberapa faktor – faktor yang mempengaruhi perguliran dana. Dari penelitian ini pula diketahui beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam program perguliran dana, yaitu : faktor identifikasi jenis kegiatan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti faktor ini menunjukkan hasil yang tidak nyata pada taraf

signifikansi 5%. Faktor ini sebenarnya merupakan faktor yang sangat penting karena dengan semakin tepat identifikasi yang dilakukan berarti menunjukkan bahwa kegiatan usaha tersebut merupakan kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa setempat. Namun demikian apabila ternyata keberhasilan ini tidak diikuti dengan ketaatan membayar angsuran maka pengaruh faktor ini menjadi kurang nampak.

Pada banyak kejadian dilapangan peristiwa ini cukup sering terjadi karena kurangnya tenaga penagih atau pengontrol pengembalian dana. Lebih jauh lagi hal ini disebabkan karena tidak tersedianya dana operasional untuk kegiatan tersebut. Sehingga akan lebih baik jika pada tahun berikutnya dari dilaksanakannya program tersebut, dianggarkan dana untuk pelestarian program dana bergulir. Dimana dana tersebut digunakan sementara untuk membantu operasional kegiatan pemeliharaan program perguliran di tahun-tahun awal.

Kelembagaan merupakan faktor yang sangat penting karena merupakan sumber catatan administrasi kegiatan perguliran dana. Semua catatan pelaporan dilaporkan dari sini untuk kemudian dilaporkan ke kabupaten yang selanjutnya kabupaten melaporkan ke propinsi. Kelembagaan ini juga berfungsi sebagai bank bagi petani dan nelayan setempat.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa kesulitan para pelaku perikanan gurem adalah kekurangan modal bagi usaha tangkapan dan budidaya. Program bantuan permodalan jarang diberikan kepada petani/ nelayan gurem tersebut. Jika adapun hanya banyak diberikan kepada para nelayan besar alias juragan. Sedangkan armada

semutnya tetap sebagai buruh. Sementara yang proposional untuk menangkap dan berbudidaya adalah nelayan kecil. (Riyadi, S. 2002).

Dalam hasil penelitian faktor kelembagaan menunjukkan hasil yang tidak signifikan pada taraf 5%, hal ini disebabkan karena belum adanya hukum yang mengatur tentang perguliran dana ini secara tegas. Sehingga sangsi-sangsi yang telah tercatat dalam perjanjian, meskipun dilanggar tidak dapat dieksekusi sebagaimana mestinya. Untuk mengatasi masalah tersebut sebaiknya dalam pelaksanaan perguliran, antara kelompok tunggu dengan peminjam, sebelumnya dipertemukan untuk diberi tahu bahwa dana yang akan diterimanya kelak menunggu dari peminjam pertama. Selain itu mungkin ada baiknya dibentuk suatu forum pengawas dana bergulir yang anggota-anggotanya terdiri dari tokoh dan anggota masyarakat di desa setempat.

5.5. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini tidak melihat pada perbedaan antara petani dan nelayan. Petani dan nelayan adalah suatu pekerjaan yang berbeda, sehingga mungkin pula mereka mempunyai perilaku yang berbeda.
2. Daerah perikanan adalah terdiri dari perikanan pedalaman dan perikanan pantai. Dimana perikanan pedalaman adalah daerah perikanan yang tidak mempunyai wilayah laut, sedangkan perikanan pantai adalah yang mempunyai wilayah laut. Penelitian ini juga mengabaikan perbedaan ini .

5.6. Agenda Penelitian Mendatang

Untuk agenda penelitian mendatang, berdasar hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dimana faktor identifikasi kegiatan tidak berpengaruh nyata maka perlu dilakukan penelitian dengan menambahkan indikator yang sesuai dengan variabel di atas.

DAFTAR PUSTAKA

- Beaubien, E, 2001, *Motivation 101*, Edgewood College, Madison, Wisconsin.
- Dajan, A. 1986, “ *Pengantar Metode Statistik*”, PT. Pustaka LP3ES. Jakarta.
- Fauzi, Mursidi Basuki dan Dulgofar, 1992. “*Dana Bergulir dan Program Kredit Untuk Masyarakat Perikanan*” BPPI., Semarang.
- Keputusan Gubernur Jawa Tengah, Nomor 3 Tahun 2002, tentang “*Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2002*”, Pemda Propinsi Jawa Tengah, Semarang.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo (1999) “*Metodologi Penelitian Bisnis*”, BPFE Yogyakarta.
- Kramadibrata, AM., dkk., 2002. “ Pemberdayaan Lembaga Informal Dalam Pembangunan Masyarakat Pedesaan “.
- Mayne, J. 1998, *How One Telco Helped Rejuvenate Its Community*, Rural Telecommunications, Michigan.
- Pedoman Umum Pelaksanaan P3EMDN, 2002, BAPPEDA Propinsi Jawa Tengah.
- Pedoman Umum Pelaksanaan PEMP, 2001, Departemen Kelautan dan Perikanan.
- Perencanaan Strategik Dinas Perikanan dan Kelautan Tahun 2001 – 2005, 2001, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah.
- Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No.7 tahun 2001.
- Perikanan Jawa Tengah Dalam Angka, 2001, Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah, Semarang.
- Rahayu, Sri K, dkk., 2001, “*Pelaksanaan Reorientasi Kebijakan Subsidi BBM di Kab. Jember, Jatim ; Kab. Kapuas, Kalteng; Kab. Barito Utara, Kalsel*”, Lembaga Penelitian SMERU.
- Rapat Koordinasi Pembangunan Pertanian Propinsi Jawa Tengah, 1999, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Dinas Perikanan Propinsi Jawa Tengah.

- Riyadi, M., 2001, "**Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi Upaya Memberi Subsidi BBM Yang Tepat Sasaran**" UNSIL Tasikmalaya.
- Rao Purba , 1996 , "**Measuring Consumer Perception Through Factor Analysis**" , The Asian Manager Feb – Mar, 1996.
- Sidik, I.G., 1999. " Organizational Learning and Technology Orientation in Emerging NICs" Prasetya Mulya, Jakarta.
- SMERU, 2001, "**Pelaksanaan Reorientasi Kebijakan Subsidi BBM di Kab. Jember, Jatim Kab. Kapuas, Kalteng Kb. Barito Utara**". www.smeru.or.id.
- Supranto, J., 1995, "**Ekonometrik (Buku Dua)**", Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Tampubolon, M, 2002, "**Pendidikan Pola Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Sesuai Tuntutan Otonomi Daerah**", Balitbang Dikdasmen Dikti PLSP Kebudayaan Setjen Itjen, Jakarta.
- Wiratno, dkk., 1999 "**Identifikasi dan Pengembangan Komoditi Unggulan Sektor Pertanian di Propinsi Jawa Tengah**" Pusat Penelitian Kajian Pembangunan Lembaga Penelitian, UNDIP, Semarang.